



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**APLIKASI TEORI GAYA PENGASUHAN BAUMRIND
DALAM MODEL INTERAKSI ANTARA PEMERINTAH DAN
RAKYAT UNTUK MENCAPAI INDONESIA YANG
DEMOKRATIS**

**BIDANG KEGIATAN:
PKM GAGASAN TERTULIS**

Diusulkan Oleh:

Rheza Ardiansyah I24070020 (2007)

Putri Widha Sari I24080075 (2008)

Putri Wika Sari I24080076 (2008)

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : APLIKASI TEORI GAYA PENGASUHAN
BAUMRIND DALAM MODEL INTERAKSI
ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT UNTUK
MENCAPAI INDONESIA YANG DEMOKRATIS
2. Bidang Kegiatan : PKM Gagasan Tertulis
3. Penulis :
- a. Nama Lengkap : Rheza Ardiansyah
 - b. NIM : I24070020
 - c. Jurusan : Ilmu Keluarga dan Konsumen
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor
 - e. Alamat Rumah dan No Tel/HP : Wisma Pioneer No. 21 Kelurahan
Balumbang Jaya Kecamatan Darmaga
Kabupaten Bogor 16680 No Tel.
085721751422
5. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 2 (dua) orang
6. Dosen Pendamping
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Melly Latifah, M.Si.
 - b. NIP : 19621029 199002 2 001
 - c. Alamat Rumah dan No Tel/HP : Komplek Perumahan Dosen
Kampus IPB Darmaga Jalan
Cempaka No. 7, Kabupaten Bogor/
08121102962

Menyetujui,
Ketua Departemen IKK

Bogor, 23 Maret 2010
Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Ir. Hartoyo, M. Sc
NIP. 19630714 198703 1 002

Rheza Ardiansyah
NIM. I24070020

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
NIP. 19581228 98503 1 003

Ir. Melly Latifah, M.Si.
NIP. 19621029 199002 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya kehadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah Program Kegiatan Kreativitas Mahasiswa bidang Gagasan Tertulis yang berjudul **APLIKASI TEORI GAYA PENGASUHAN BAUMRIND DALAM MODEL INTERAKSI ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT UNTUK MENCAPAI INDONESIA YANG DEMOKRATIS**. Gagasan tertulis ini ditujukan untuk mengikuti lomba Program Kreativitas Mahasiswa bidang Gagasan Tertuli tahun 2010.

Gagasan tertulis ini berisi kajian mengenai salah satu aplikasi teori tentang interaksi dalam keluarga, yang diterapkan dalam pola interaksi yang terjadi pada suatu negara. Penulisan gagasan tertulis ini bertujuan untuk memberikan solusi maupun referensi bagi terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan keluarga maupun sikap bernegara.

Ucapab terima kasih kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan gagasan tertulis ini. Semoga gagasan tertulis ini dapat semakin membuka wawasan masyarakat tentang cara membentuk sikap bernegara yang baik agar peningkatan kualitas bangsa turut tercapai. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bogor, 22 Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN	vi
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
Gagasan	2
PENUTUP.....	7
Kesimpulan	7
DAFTAR PUSTAKA	8
LAMPIRAN.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan antara <i>responsiveness</i> dan <i>demandingness</i> terhadap gaya pengasuhan.....	3
Tabel 2. Hubungan antara <i>responsiveness</i> dan <i>demandingness</i> rakyat terhadap situasi negara	6

RINGKASAN

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*The Founding Fathers*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*). Dengan dianutnya paham demokrasi di atas, partisipasi rakyat dalam memberi masukan terhadap proses pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat terjamin, sehingga hubungan antara rakyat dan pemerintah tidak bersifat feodalistis.

Sementara itu dalam ilmu pengasuhan, dikenal teori gaya pengasuhan. Teori itu beranjak dari pendapat Baumrind (1986) yang menyatakan bahwa proses pengasuhan terdiri dari dua unsur penting, yaitu *demandingness* dan *responsiveness*. Interaksi antara unsur *responsiveness* dan *demandingness* dalam proses pengasuhan diimplementasikan dalam gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan adalah pola umum yang biasa diterapkan dalam mengasuh seorang anak. Gaya pengasuhan dibagi dalam 4 tipe, yaitu *permissive*, *uninvolved parenting style*, *authoritative*, dan *authoritarian*.

Hubungan antara pemerintah dan rakyat bisa dianalogikan sebagai hubungan antara ibu dan anak. Dalam beberapa kasus, pemerintah bisa menjadi ibu yang berperan sebagai pengasuh, dan rakyat sebagai anak yang dibimbing. Begitupun sebaliknya, saat pemerintah membutuhkan masukan dan bimbingan, DPR sebagai representasi suara rakyat bertindak sebagai ibu atau pengasuh, sementara pemerintah (badan eksekutif) menerima bimbingan dari rakyatnya atas berbagai gerakannya menuju pencapaian Indonesia sebagai masyarakat madani. Atas analogi di atas, hubungan pemerintah dan rakyatnya dapat dianalisa dengan gaya pengasuhan yang dikemukakan oleh Baumrind (1986). Hubungan ibu-anak di atas ternyata tidak seharmonis yang diharapkan. Partisipasi rakyat dalam membangun kualitas pemerintahan ini kerap dilakukan dengan cara-cara yang mengarah pada sikap menuntut tanpa diiringi solusi, bahkan anarkis. Kajian terhadap analogi rakyat sebagai pengasuh dan pemerintah sebagai anak adalah titik fokus pembahasan dalam karya tulis ini, karena hubungan itu di Indonesia saat ini lebih mengarah pada gaya *authoritarian*.

Akibat jangka panjang yang mungkin terjadi jika rakyat selalu berposisi kontra secara ekstrim adalah perubahan sistem pemerintahan, bahkan perubahan ideologi yang akan mempengaruhi aspek kehidupan lain dalam berbangsa dan bernegara. Klarifikasi, dialog dan pendalaman persoalan serta pengajuan solusi tepat adalah cara yang terbaik dalam menyikapi persoalan bangsa, demikian solusi yang dihimbau presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dalam rangka memperingati hari lahir pancasila pada 1 Juni 2006.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rentang waktu perkembangannya, Indonesia terus mengalami dinamika dalam mencari bentuk yang paling ideal untuk menjalankan pemerintahan. Berbagai bentuk pemerintahan telah dialami bangsa pertama yang merdeka setelah perang dunia II berakhir ini. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*The Founding Fathers*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (sekanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*). Menurut paham demokrasi ini, publik perlu diberi kesempatan luas untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan dianutnya paham demokrasi diatas, partisipasi rakyat dalam memberi masukan terhadap proses pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat terjamin, sehingga hubungan antara rakyat dan pemerintah tidak bersifat feodalistis.

Hubungan antara pemerintah dan rakyat bisa dianalogikan sebagai hubungan antara ibu dan anak. Dalam beberapa kasus, pemerintah bisa menjadi ibu yang berperan sebagai pengasuh, dan rakyat sebagai anak yang dibimbing. Begitupun sebaliknya, saat pemerintah membutuhkan masukan dan bimbingan, DPR sebagai representasi suara rakyat bertindak sebagai ibu atau pengasuh, sementara pemerintah (badan eksekutif) menerima bimbingan dari rakyatnya atas berbagai gerakannya menuju pencapaian Indonesia sebagai masyarakat madani. Atas analogi diatas, hubungan pemerintah dan rakyatnya dapat dianalisa dengan gaya pengasuhan yang dikemukakan oleh Baumrind (1986). Teori gaya pengasuhan tersebut menyatakan bahwa terdapat dua unsur yang menjadi fondasi proses pengasuhan, yaitu *demandingness* dan *responsiveness*. *Demandingness* adalah kecenderungan orang tua untuk menetapkan peraturan secara ketat terhadap anaknya, kontrol yang kuat agar berlaku matang dan dewasa. Sedangkan *responsiveness* adalah kecenderungan orang tua untuk bersikap hangat serta menerima permintaan dan perasaan anak.

Hubungan ibu-anak diatas ternyata tidak seharmonis yang diharapkan. Partisipasi rakyat dalam membangun kualitas pemerintahan ini kerap dilakukan dengan cara-cara yang mengarah pada sikap menuntut tanpa diiringi solusi, bahkan anarkis. Pada tanggal 28 Januari 2010, sekitar 500 orang demonstran yang berasal dari Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) terlibat bentrok dengan polisi di depan Istana Merdeka. Bentrok terjadi setelah demonstran merangsek maju mendekati pagar Istana Merdeka dengan mendorong polisi yang berjaga. Akibatnya beberapa orang diamankan oleh polisi, sedangkan di pihak

lain, seorang anggota kepolisian terluka di dahinya. Ikrar Nusa Bhakti dalam situs Tempo Interaktif menyatakan bahwa aksi demonstrasi adalah sebuah hal yang wajar dalam sebuah tatanan negara demokrasi, karena hal itu adalah hak asasi manusia dan salah satu bentuk partisipasi politik rakyat Indonesia. Namun pengamat politik itu tidak setuju jika demonstrasi dijadikan alat perusak tatanan demokrasi, karena penyampaian pendapat dan aspirasi telah diatur dalam konstitusi. Atas dasar kondisi aktual yang berkaitan dengan teori diatas, maka karya tulis ini dibuat sebagai salah satu kontribusi dalam mewujudkan kualitas bangsa yang lebih baik.

Tujuan dan Manfaat

Penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan mengenai analogi antara gaya pengasuhan dalam keluarga dan hubungan rakyat dan pemerintah dalam suatu negara. Selain itu gagasan tertulis ini juga bertujuan untuk menyadarkan bangsa Indonesia agar bersikap partisipatif dalam proses pembangunan, serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Manfaat yang hendak dicapai adalah timbulnya kesadaran rakyat Indonesia untuk turut serta dalam proses pembangunan yang diupayakan pemerintah, sehingga pencapaian tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik.

GAGASAN

Aset terbesar yang perlu dimiliki sebuah negara adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, tanpa Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah pun sebuah bangsa akan mampu berkontribusi dalam kancah internasional. Hal demikian terjadi pada Singapura. Negeri pulau ini mampu menjadi panutan berbagai bangsa karena pencapaiannya yang baik dalam berbagai bidang. Begitu juga dengan Indonesia, agar bisa menjadi bangsa yang berkontribusi tinggi dalam kesejahteraan global, maka Indonesia pun perlu memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Pembentukan sumber daya manusia unggul tersebut dilakukan melalui proses pengasuhan yang dilakukan dalam keluarga sebagai organisasi paling kecil dan pertama yang dilalui seorang manusia.

Proses pengasuhan bukanlah hal kecil yang bisa diabaikan karena dampaknya terhadap pola pikir dan laku anak akan bertahan dalam rentang waktu yang panjang. Kesadaran tentang pentingnya pengasuhan dan penerapannya dengan cara yang tepat mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian tentang elemen apa saja pada pengasuhan yang dapat membentuk kualitas SDM. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat dua unsur penting dalam pengasuhan, yaitu *demandingness* dan *responsiveness*. Menurut Baumrind (1986),

demandingness adalah kecenderungan orang tua untuk menetapkan peraturan secara ketat, kontrol yang kuat agar anak berlaku matang dan dewasa. Sedangkan *responsiveness* adalah kecenderungan orang tua untuk bersikap hangat serta menerima permintaan dan perasaan anak.

Interaksi antara unsur *responsiveness* dan *demandingness* dalam proses pengasuhan diimplementasikan dalam gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan adalah pola umum yang biasa diterapkan dalam mengasuh seorang anak. Gaya pengasuhan yang tinggi dimensi *responsiveness* tapi rendah dalam dimensi *demandingness* disebut *permissive*, sedangkan gaya yang dipraktekkan dengan rendahnya dimensi *demandingness* dan kadar *responsiveness* disebut *uninvolved parenting style*. Jika *responsiveness* dipraktekkan dengan kadar yang kecil, sementara *demandingness* memiliki kadar lebih tinggi, maka gaya pengasuhan yang diterapkan tergolong *authoritative*, sedangkan jika kedua unsur pengasuhan diterapkan dalam kadar yang sama-sama tinggi, maka gaya pengasuhan yang diterapkan disebut *authoritarian*. Hubungan antar kadar *demandingness* dan *responsiveness* disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hubungan antara *responsiveness* dan *demandingness* terhadap gaya pengasuhan

<i>Demandingness (D)</i>	Tinggi	Rendah
<i>Responsiveness (R)</i>		
Tinggi	<i>Authoritative</i>	<i>Permissive</i>
Rendah	<i>Authoritarian</i>	<i>Uninvolved</i>

Gaya pengasuhan yang paling baik adalah *authoritative* karena dengan penerapan *responsiveness* dan *demandingness* yang sama tinggi, maka anak didik akan menjadi disiplin dan patuh pada peraturan. Sementara itu jika *authoritarian* yang dianut, anak akan menjadi sosok yang pasif dan tidak memiliki keberanian sebagai efek dari pemberian aturan ketat tanpa diiringi penjelasan yang cukup. Lain halnya dengan karakter produk pengasuhan *uninvolved*, gaya yang diterapkan dengan kadar *responsiveness* dan *demandingness* yang rendah ini akan menjadikan anak sebagai sosok yang apatis. Sementara itu gaya pengasuhan *permissive* akan menghasilkan sifat manja dan ketergantungan tinggi pada anak.

Bentuk interaksi antara rakyat dan pemerintah Indonesia dari masa ke masa mengalami pasang-surut. Hal itu tergambar dalam buku karya Komisi Ilmu-Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2007). Sejak memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia terus mengalami dinamika bentuk pemerintahan yang mempengaruhi partisipasi rakyatnya. Pemilu 1955 menjadi salah satu barometer ideal dari proses pemilihan wakil rakyat dengan membolehkan partai lokal dan perseorangan sebagai kandidat, sehingga partisipasi rakyat benar-benar terjamin. Pemilu itu kemudian melahirkan demokrasi parlementer. Namun model demokrasi itu diwarnai situasi di dalam DPR dan Dewan Konstituante yang begitu rapuh oleh orasi-orasi dan sidang-sidang yang penuh argumentasi, namun selalu gagal mencapai kesepakatan. Republik pun dikepung oleh pemberontakan daerah, kelangkaan minyak tanah, kelaparan, banyak rakyat jelata yang miskin. Selanjutnya pada tahun 1959, presiden RI pertama mengeluarkan dekrit yang menjadi penanda diberlakukannya model

demokrasi terpimpin yang mengajarkan kesatuan antara rakyat dan pemerintah. Namun model demokrasi itu tidak lama berlangsung akibat ancaman gerakan pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 (G.30.S/PKI) yang menggoyahkan model tersebut, hingga akhirnya terjadi pemindahan jabatan presiden ke tangan Soeharto pada 1966.

Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto bergerak dalam jalur demokrasi pancasila. Model demokrasi pancasila itu mampu bertahan hingga 32 tahun. Akan tetapi model ini pada akhirnya runtuh sebagai akibat dari kondisi negara yang tidak stabil dan mengalami krisis dalam segala aspek. Tahun 1998 merupakan lembaran baru bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Model demokrasi yang diterapkan berganti menjadi demokrasi reformasi. Dalam model ini, rakyat lebih bebas dalam berpartisipasi dan memberi masukan terhadap pemerintahan. Era baru yang menyediakan ruang bagi rakyat untuk bersikap interaktif terhadap pemerintah, seringkali digunakan dengan cara yang tidak tepat. Demonstrasi yang diiringi perusakan fasilitas umum seringkali mewarnai kehidupan bernegara. Di sisi lain, kondisi yang membahayakan bangsa ini adalah kurangnya partisipasi sebagai rakyat dalam pemecahan masalah bangsa yang ditunjukkan dengan pemberian kritik terhadap pemerintah tanpa diiringi solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai polemik. Mulai dari kasus Bank Century, hingga skandal BLBI yang hingga kini belum terselesaikan. Sebagai sebuah negara demokrasi, peran rakyat sangat tinggi dalam pengambilan keputusan dan pemilihan solusi. Berbagai alternatif penyampaian pendapat menjadi pilihan rakyat dalam misinya turut menjadi bagian dari solusi bangsa. Akan tetapi, cara penyampaian yang dipilih rakyat kerap menjadi boomerang bagi kondisi bangsa sendiri. Demonstrasi yang biasanya diinisiasi oleh mahasiswa tak jarang berujung anarkis, sehingga bukan lagi solusi yang menjadi pesan atas kondisi itu, namun justru membuat bertambahnya permasalahan bangsa.

Teori gaya pengasuhan Baumrind menjelaskan bahwa terdapat dua unsur penting dalam gaya pengasuhan pada sebuah keluarga, yaitu *demandingness* dan *responsiveness*. Kedua gaya ini mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang, dimana *demandingness* lebih condong ke arah pola pengasuhan yang otoriter, sedangkan *responsiveness* lebih mengacu kepada pola pengasuhan yang demokratis. Namun keduanya juga dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Hal ini dapat diaplikasikan dalam model interaksi antara pemerintah dan rakyat di Indonesia.

Posisi rakyat dan pemerintah dalam satu payung negara yang sama, bagaikan anak dan ibu/pengasuh. Berdasarkan hubungan tersebut, maka kedua unsur interaksi dalam pengasuhan pun dapat diimplementasikan. Sikap *responsiveness* dalam perumpamaan ini, dapat diasosiasikan dengan dukungan atas kebijakan atau perlakuan yang sesuai dengan kehendak pihak lainnya. Sementara *demandingness* adalah keputusan yang sebenarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, bersifat tegas namun terkadang ditafsirkan berbeda oleh pihak lainnya.

Dalam beberapa hal, pemerintah berlaku sebagai ibu, dan rakyat menjadi anak yang menerima didikan ibu. Dalam analogi ini, pemerintah harus mampu memberi contoh (*responsiveness*) agar sang anak mampu bersikap sebagaimana yang diharapkan. Sikap *demandingness* pemerintah ditunjukkan dengan

pemberlakuan hukuman atas pelanggaran terhadap sejumlah peraturan. Ketegasan penerapan peraturan yang diiringi kesediaan rakyat untuk menerima konsekuensi adalah cerminan gaya pengasuhan *authoritative* yang akan menjadikan anak didik (rakyat) sosok yang baik sesuai dengan harapan bersama.

Sementara itu situasi kontraposisi dapat pula terjadi dalam pembagian peran diatas. Pemerintah dapat menjadi anak yang dibimbing rakyat sebagai ibunya. Kondisi inilah yang menjadi titik penting dalam pembahasan gagasan tertulis ini, karena hubungan rakyat sebagai ibu dan pemerintah sebagai anak saat ini lebih mengarah pada gaya *authoritarian*. Sikap itu tercermin dalam fenomena maraknya demonstrasi yang mengarah pada tindakan anarkis. Menurut <http://id.wikipedia.org>, demonstrasi menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, dan menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Demonstrasi atau unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Jakarta. Kecenderungan untuk beraspirasi melalui demonstrasi anarkis adalah salah satu bentuk *demandingness* rakyat terhadap anaknya (pemerintah), sedangkan dukungan dan evaluasi secara tertib dan damai adalah salah satu bentuk *responsiveness*.

Implementasi dari perpaduan unsur *demandingness* dan *responsiveness* dengan intensitas yang berbeda, dapat menghasilkan empat macam pola interaksi, yaitu *authoritative parenting style*, *authoritarian parenting style*, *permissive parenting style*, dan *uninvolved parenting style*. Gaya pengasuhan *authoritative* merupakan hasil dari perpaduan yang memiliki intensitas tinggi, baik dalam dimensi *demandingness* maupun *responsiveness*. Jika hal ini diterapkan pada pola interaksi, dimana pemerintah diposisikan sebagai anak dan rakyat sebagai ibu, maka akan menghasilkan suatu perpaduan yang seimbang dan pada akhirnya terbentuklah sebuah negara yang demokratis.

Sementara itu jika *demandingness* diterapkan dalam kadar yang tinggi, dan *responsiveness* rakyat berkadar rendah, situasi seperti tergambar pada akhir masa orde baru akan kembali terjadi. Hal itu juga akan terlihat pada sikap rakyat yang mendominasi dalam mengaspirasikan keinginan mereka, sehingga pemerintah pun akan terlihat kehilangan wibawanya sebagai sebuah institusi tertinggi dalam sebuah negara, yang sudah sepatutnya berhak untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Kasus yang dapat diambil sebagai contoh yaitu, kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada kasus ini rakyat yang bertindak semaunya, merasa mampu membangun pemerintahan sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Sementara, jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka kewenangan pemerintah patut dipertanyakan. Namun, kasus ini dapat terselesaikan dengan adanya tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah dalam mengungkap dan mencari antek-antek yang memprovokasi gerakan tersebut.

Sebaliknya, jika *responsiveness* rakyat sebagai pengasuh lebih tinggi dibanding *demandingness*, maka sistem pemerintahan komunis seperti yang terjadi di Korea Utara akan dialami bangsa kita. Jika Indonesia mengalami pergeseran ideologi, maka nilai-nilai kehidupan lain pun akan turut berubah.

Dampak paling buruk dari interaksi kedua unsur pengasuhan itu adalah pecahnya sebuah negara (*collapse*), akibat kadar *responsiveness* dan *demandingness* diterapkan dalam kadar minim. Kondisi itu akan diawali dengan perubahan sikap pemerintah yang menjalankan pemerintahannya dengan sekehendak hati mereka, tanpa akan mendengarkan aspirasi dari rakyat. Saat

pemerintah sesumbar dengan gerakannya, rakyat pun tidak bersuara. Bukan karena tidak berani, melainkan mereka menganggap bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi di negaranya dan menganggap hal itu sudah sewajarnya ditangani oleh pemerintah saja tanpa ikut memberikan dukungan terhadap kebijakan yang ada, serta seolah-olah membiarkan semua itu terjadi. Hubungan kadar *responsiveness* dan *demandingness* rakyat atas perannya sebagai pengasuh dan pemerintah sebagai anak disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hubungan antara *responsiveness* dan *demandingness* rakyat terhadap situasi negara

<i>Demandingness (D)</i>	Tinggi	Rendah
<i>Responsiveness (R)</i>	Tinggi	Rendah
Tinggi	Demokratis	Komunis
Rendah	Akhir Orde Baru	<i>Collapse</i>

Tak banyak rakyat yang menginginkan perubahan dan menyatakan koreksinya terhadap pemerintah dengan baik dan cara yang tepat. Saat rakyat tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah terkait perbaikan gaji, sistem *outsourcing* dan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (CAFTA) contohnya, alih-alih memberikan penyadaran terhadap pengambil kebijakan tentang bahaya yang mereka sadari lebih awal, demonstrasi seakan selalu menjadi pilihan pertama. Padahal salah satu metode penyampaian pendapat itu berrisiko mengalami distorsi informasi dan provokasi. Cara penyampaian koreksi itulah yang perlu dikoreksi.

Dalam sebuah tatanan pemerintahan, keberadaan oposisi bisa menjadikan roda pemerintahan berjalan netral, karena saat pemerintah melakukan hal yang dianggap menyimpang, ada pihak yang tidak berpihak padanya dan bisa melakukan koreksi. Jika pemerintah berjalan tanpa diiringi oposan, ia akan melaju tanpa kendali, dan masa orde baru yang “berjasa” dalam peningkatan kerusakan bangsa akan kembali terulang. Sebaliknya, jika oposisi terlalu kontra, maka pemerintah akan menjadi lemah karena tidak mendapat dukungan.

Akibat jangka panjang yang mungkin terjadi adalah perubahan sistem pemerintahan, bahkan perubahan ideologi yang akan mempengaruhi aspek kehidupan lain dalam berbangsa dan bernegara. Klarifikasi, dialog dan pendalaman persoalan serta pengajuan solusi tepat adalah cara yang paling tepat dalam menyikapi persoalan bangsa, demikian solusi yang dihimbau presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dalam rangka memperingati hari lahir pancasila pada 1 Juni 2006. Itulah yang perlu dipikirkan, baik oleh pemerintah maupun rakyatnya untuk saling duduk berdampingan, berdiskusi mengenai persoalan yang ada sehingga akan muncul jalan terbaik dari pemecahan masalah secara bersama-sama. Bukan hanya dengan berdemonstrasi yang kemudian hanya menimbulkan komunikasi satu arah. Selain itu, pemerintah juga harus bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan aspirasi rakyat dengan terbuka. Inilah yang kemudian dapat disebut sebagai hasil gaya pengasuhan authoritative, dimana kemudian demokratisasi dapat berdiri tegak dan berjalan dengan semestinya. Serta pola interaksi antara pemerintah dan rakyat yang seimbang, saling mengisi satu sama lain. Kondisi inilah yang selama ini diharapkan oleh semua pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah perlu diiringi pemberian solusi atas masalah yang sedang dibahas, karena jika rakyat hanya bisa menuntut tanpa memberi solusi, maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan rakyat dan menjadi lemah karena tidak mendapat dukungan. Selain itu sikap demonstrasi yang diwarnai tindakan anarkis hanya akan memperkeruh persoalan. Untuk itulah penulis merasa perlu menuangkan gagasannya mengenai solusi yang bisa diambil dalam mengatasi persoalan yang diangkat di dalam gagasan tertulis ini. Solusi tepat atas partisipasi rakyat dan pemerintah dalam pembangunan bangsa adalah sikap saling terbuka dan membudayakan kebiasaan berdialog dalam mencapai pemecahan atas suatu masalah.

Pemerintah dan rakyat perlu mengetahui dampak dari berbagai sikap yang selalu mendasari pergerakannya masing-masing. Kajian dalam institusi kenegaraan perlu dilakukan agar pemerintah menyadari hal tersebut. Sementara itu rakyat pun perlu memahami setiap duduk persoalan kenegaraan, agar tidak terjadi miskomunikasi. Mahasiswa biasanya menjadi motor utama pergerakan demonstrasi menyikapi berbagai kebijakan pemerintah, oleh karena itu, pengetahuan dan kajian tentang putusan yang dikritisi perlu diperdalam, sehingga ritual demonstrasi benar-benar menjadi ajang penyampaian aspirasi. Selain itu, mekanisme dan pelaksanaan demonstrasi juga perlu diperbaiki agar sikap anarkis dan destruktif dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. *Restorasi Pancasila*. Bogor: Brighten Press.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Demonstrasi> [15 Maret 2010]
- Hastuti Dwi. 2008. *Pengasuhan: Teori, Prinsip dan Aplikasinya di Indonesia*. Bogor: IPB Press
- Komisi Ilmu-Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2007. *Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi*. Yogyakarta: Aditya Media
- Sianipar Tito. *Demonstrasi 28 Januari Ialah Hak Politik Warga Negara*. 28 Januari 2010.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/01/26/brk,20100126,id.html>.
[15 Maret 2010]
- Santrok, John W. 2003. *Adolesence*. Jakarta: Erlangga

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA PELAKSANA

1. Nama Lengkap : Rheza Ardiansyah
 Tempat, tanggal lahir : Garut, 7 September 1989
 Alamat Bogor : Wisma Pioneer. Jalan Babakan Lio 21 RT01 RW08
 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat
 Kabupaten Bogor
 Alamat Asal : Kp. Kudang RT01 RW03 Desa Limbangan Timur
 Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut
 Email : hore_punya_email@yahoo.com
 No. Telp/HP : +6285721751422

Pendidikan :

- Nama SD & tahun : SDN Limbangan Timur 1 (1995-2001)
- Nama SLTP & tahun : SMPN 1 Limbangan (2001-2004)
- Nama SMA & tahun : SMAN 1 Garut (2004-2007)
- Nama Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor (2007- sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Anggota pengurus OSIS Sekbid 4 SMPN 1 Limbangan (2002-2003)
- Kabid OSIS Sekbid 8 SMAN 1 Tarogong Kidul (2006-2007)
- Anggota UKM PSM Agriaswara IPB (2007-sekarang)
- Anggota UKM MAX!! IPB (2007-sekarang)
- Penyiar Agri FM (2008)
- Staf Kominfo BEM KM IPB Kabinet Totalitas Perjuangan (2008-2009)
- Reporter Koran Kampus IPB (2008-2009)
- Staf Kominfo BEM KM IPB Gemilang (2009-2010)
- Kadiv Kominfo Himpunan Mahasiswa Garut (Himaga) (2009-sekarang)
- Wakil Ketua Eco-Agrifarma (2009-2010)
- Anggota klub fotografi Shutter (2009-sekarang)
- Anggota komunitas Blogger IPB (2009-sekarang)
- Kepala divisi riset Koran Kampus (2010-sekarang)
- Anggota klub Wacana Telisik Sastra (WTS) (2010-sekarang)

Pengalaman Seminar dan Pelatihan:

- The Power Motivation of Success, 2008 I'm Coming! (2007)
- Seminar dan Pelatihan Budidaya Jamur Tiram, Biota (Biology on Training

(2007)

- Pelatihan Corel X3 BEM FEM (2008)
- Pelatihan Kepemimpinan Ditmawa IPB (2008)
- Pelatihan Kepemimpinan Ditmawa IPB (2009)

2. Nama Lengkap : Putri Widha Sari
 Tempat, tanggal lahir : Madiun, 13 November 2010
 Alamat Bogor : Jalan Duta Persada No. 17/ Blok E No. 6,
 Kompleks Goodyear, Sindang Barang, Bogor.
 16117.
 Alamat Asal : Jalan Duta Persada No. 17/ Blok E No. 6,
 Kompleks Goodyear, Sindang Barang, Bogor.
 16117.
 Email : putri.widha.sari@gmail.com
 No. Telp/HP : +6281280889017

Pendidikan :

- Nama TK & tahun : TK Arafah Medan (1994-1995)
- Nama SD & tahun : SDN Eria Medan (1995-1997)
 SDN Panaragan II Bogor (1997-2000)
 SDN Polisi 5, Bogor (2000-2001)
- Nama SLTP & tahun : SLTPN 3 Bogor (2001-2003)
 SMPN 1 Lubuk Pakam Medan (2003-2004)
- Nama SMA & tahun : SMAN 1 Lubuk Pakam Medan (2004-2005)
 SMAN 5 Bogor (2005-2007)
- Nama Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor (2008-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- Pradana Putri Pramuka SMAN 5 Bogogr (2005-2006)
- PSDM ROHIS SMAN 5 Bogor (2005-2006)
- Ikatan alumni ROHIS SMA (2009-sekarang)
- Keputrian LDF FORSIA FEMA IPB (2010-sekarang)
- Sekretaris Human Resources HIMAIKO FEMA IPB (2010-sekarang)

Pengalaman Seminar dan Pelatihan:

- Leadership School FATETA IPB (2008)
- Pelatihan Karya Tulis Ilmiah FORCES-FEMA IPB (2009)
- Pelatihan Penulis Pendamping IPB PREES (2009)
- Seminar Internasional Scholarship Education Expo (ISEE) IPB (2009)
- Seminar Nasional Ekologi Manusia COHESI FEMA IPB (2009)

3. Nama Lengkap : Putri Wika Sari
 Tempat, tanggal lahir : Madiun, 13 November 2010
 Alamat Bogor : Jalan Duta Persada No. 17/ Blok E No. 6,
 Kompleks Goodyear, Sindang Barang, Bogor.
 16117.
 Alamat Asal : Jalan Duta Persada No. 17/ Blok E No. 6,
 Kompleks Goodyear, Sindang Barang, Bogor.
 16117.
 Email : putriwikasari@gmail.com
 No. Telp/HP : +6281362310259

Pendidikan:

- Nama TK & tahun : TK Arafah Medan (1994-1995)
- Nama SD & tahun : SDN Eria Medan (1995-1997)
 SDN Panaragan II Bogor (1997-2000)
 SDN Polisi 5, Bogor (2000-2001)
- Nama SLTP & tahun : SLTPN 3 Bogor (2001-2003)
 SMPN 1 Lubuk Pakam Medan (2003-2004)
- Nama SMA & tahun : SMAN 1 Lubuk Pakam Medan (2004-2005)
 SMAN 5 Bogor (2005-2007)
- Nama Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor (2008-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- Bendahara Putri Pramuka SMAN 5 Bogogr (2005-2006)
- Bendahara PSDM ROHIS SMAN 5 Bogor (2005-2006)
- Bendahara HRD Ikatan alumni ROHIS SMA (2009-sekarang)
- Bendahara Umum LDF FORSIA FEMA IPB (2010-sekarang)
- Sekretaris Human Resources HIMAIKO FEMA IPB (2010-sekarang)

Pengalaman Seminar dan Pelatihan:

- Leadership School FATETA IPB (2008)
- Pelatihan Karya Tulis Ilmiah FORCES-FEMA IPB (2009)
- Pelatihan Penulis Pendamping IPB PREES (2009)
- Seminar Internasional Scholarship Education Expo (ISEE) IPB (2009)
- Seminar Nasional Ekologi Manusia COHESI FEMA IPB (2009)